

BAB II

KAJIAN TEORI.

A. Landasan Teori

1. Akuntansi

Akuntansi adalah salah satu seni mencatat, mengatur, meringkas, dan melaporkan secara sistematis isi transaksi bisnis sesuai dengan standar yang diterima secara umum. Oleh karena itu, mereka yang tertarik pada perusahaan dapat menginformasikan diri mereka sendiri kapan saja tentang aset dan hasil operasi perusahaan untuk membuat keputusan dan memilih tindakan ekonomi yang berbeda. Karena disamakan dengan beberapa seniman, akuntansi disebut sebagai seni yang ingin menggambar objek yang sama, sehingga pelukis menggambarkan jalur sesuai dengan objek gambar. Demikian pula para pelaku akuntansi dapat membuat laporan berdasarkan keahlian mereka sambil mematuhi aturan akuntansi yang sesuai.¹

Akuntansi dapat secara luas didefinisikan sebagai "proses mengidentifikasi, mengukur, dan mentransmisikan informasi ekonomi untuk memungkinkan pengguna informasi membuat penilaian yang tepat." Memberikan informasi tentang untuk berbagai pengguna untuk mengevaluasi kewajiban manajemen dan membuat keputusan keuangan, kinerja keuangan dan kondisi keuangan organisasi pelapor sangat membantu. Setiap transaksi dan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan dicatat melalui proses pencatatan. Tujuan prosedur ini adalah untuk melacak semua transaksi bisnis dan operasi dengan cara yang memungkinkan untuk melacak kejadian ekonomi masa lalu dengan pasti. Dokumentasi pendukung diperlukan untuk prosedur ini, termasuk faktur, catatan, dan tanda terima.

Karena pemisahan kepemilikan dan kontrol dari bisnis, fungsi akuntansi adalah untuk mengasumsikan akuntabilitas manajemen dari pemilik (pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya) dari aset atau aset bisnis. Akuntansi

¹ Anna Marina and other, Sistem Informasi Akuntansi Teori dan Pratikal (Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2017).

terkait dengan kebutuhan bisnis mereka untuk melacak transaksi, termasuk bagaimana mereka membelanjakan aset mereka dan mengelola hutang mereka.

Jusup mendefinisikan akuntansi sebagai sistem informasi yang memantau operasi, mengubah data menjadi laporan, dan menyajikan temuan kepada pembuat keputusan secara visual. Akuntansi adalah prosedur untuk mengumpulkan, menyortir, menganalisis, dan melaporkan data keuangan organisasi. Metode ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua transaksi/kegiatan usaha yang tercatat pada proses sebelumnya ke dalam kelompok-kelompok rekening sejenis. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengetahui kondisi setiap akun secara akurat dan detail, terutama dari segi keseimbangan dan frekuensi mutasi, serta untuk memudahkan proses penyusunan laporan keuangan.
2. Ringkasan adalah proses penyederhanaan mutasi transaksi yang terjadi ketika transaksi/kegiatan usaha tersebut telah melewati tingkat klasifikasi sebelumnya. Tujuan dari proses ini adalah untuk memfasilitasi persiapan akun tahunan, karena proses ini secara singkat menyajikan total saldo semua akun kolektif.
3. Pelaporan penyusunan laporan keuangan yang berasal dari fase sebelumnya. Proses ini adalah hasil dari proses akuntansi. Laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan perusahaan, kegiatan ekonomi perusahaan dan perubahan modal (ekuitas) perusahaan.
4. Analisis data keuangan, adalah proses analisis yang dilakukan oleh pengguna laporan. Proses ini berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Akuntansi berada di garis depan dan memainkan peran penting dalam pengelolaan sistem ekonomi dan sosial kita. Keputusan yang dibuat oleh individu, pemerintah, dan entitas bisnis lainnya ditentukan oleh penggunaan sumber daya suatu negara oleh mereka. Tujuan utama akuntansi adalah untuk

menangkap, meringkas, dan menganalisis fakta ekonomi untuk pengambilan keputusan.²

2. Konsep Akuntabilitas

A. Pengertian Akuntabilitas

Bonves mengatakan bahwa Akuntabilitas merupakan konsep yang tidak lepas dari aspek kehidupan bernegara. Menurut Bovens, akuntabilitas memiliki akar historis terkait akuntansi. Meskipun konsep "akuntabilitas" dan "akuntabel" dalam perkembangannya tidak lagi terbatas pada konsep manajemen keuangan, tetapi telah meluas ke aspek kebijakan dan tata kelola.

Untuk melihat berbagai definisi akuntabilitas, berikut adalah beberapa definisi yang dikembangkan oleh sejumlah kamus penting, akademisi, dan kalangan pemerintah, antara lain sebagai berikut:

1. Webster (1996) di dalam kamusnya, *accountability* diartikan "*the quality or state of being accountable, liable, or responsible.*"
2. Dalam kamus Oxford (1995), disebutkan sebagai "*required or expected to give an explanation for one's action.*" Akuntabilitas diperlukan atau diharapkan untuk menjelaskan apa yang telah dilakukan. Menurut pengertian tersebut, akuntabilitas meliputi kewajiban untuk menyampaikan dan melaporkan segala tindakan dan kegiatan, khususnya di bidang pengelolaan keuangan, kepada otoritas/atasan yang lebih tinggi. Terminologi akuntabilitas dilihat dari sudut pandang kontrol tindakan dan pencapaian tujuan.
3. Hamid (1991) menulis dalam artikelnya "Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik": "Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai kewajiban untuk memberikan jawaban dan penjelasan atas tindakan dan prestasi seseorang kepada mereka yang berhak menuntut jawaban dan perpanjangan tersebut". Pemahaman ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berarti meminta pertanggungjawaban individu dan organisasi atas kinerja yang diukur secara subjektif mungkin.

² Hendra Harmain and Other, Pengantar Akuntansi 1,3rd edn (Medan: Madenatera, 2019).

4. Romzek dan Dubnick (1990) mengatakan: "Konsep yang lebih luas mencakup akuntabilitas administrasi publik sarana yang digunakan badan publik di dalam dan di luar organisasi". Akuntabilitas administrasi publik dalam arti yang lebih luas meliputi lembaga publik (lembaga) dan birokrat (pekerjanya), untuk mengontrol berbagai harapan yang datang dari dalam dan luar organisasi. Dengan demikian, akuntabilitas administrasi publik sebenarnya terkait dengan bagaimana birokrasi publik mewujudkan harapan publik.
5. Dalam *The Public Administration Dictionary*, Ralph C. Chandler dan Jack C. Plano mendefinisikan akuntabilitas sebagai keadaan di mana orang-orang yang menjalankan kekuasaan dibatasi oleh cara-cara eksternal dan norma-norma internal. Jadi akuntabilitas memiliki dua sisi, satu internal dan satu eksternal. Secara lahiriah, akuntabilitas berarti kewajiban untuk bertanggung jawab atas apa yang berhubungan dengan bagian akuntabilitas dengan norma-norma internal seperti instruksi profesional, etis, dan pragmatis untuk melaksanakan tanggung jawab bagi para pemimpin dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Konsep akuntabilitas sebagai audit internal sama pentingnya dengan akuntabilitas sebagai alat eksternal. Namun, tidak mengherankan bahwa bagian luar tanggung jawab lebih ditekankan daripada bagian dalam, karena bagian luar lebih mudah dilihat dan dioperasikan daripada bagian dalam.³

Akuntabilitas jika dikaitkan dengan suatu organisasi keagamaan bukan hanya sekedar pertanggungjawaban yang ada didunia saja, tetapi juga suatu pertanggungjawaban yang melibatkan watak dan sikap seseorang itu sendiri dan pertanggung jawaban seseorang kepada Tuhan. Selain itu, akuntabilitas dalam suatu organisasi keagamaan lebih spesifik kepada misi suci dari pada akuntabilitas formal. Dimana pemikiran suatu agama lebih dalam ke konteks kerangka akuntansi yang dapat dihubungkan antara konsep dengan praktik akuntansi.

³ Sjamsiar Sj. Indradi, *Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).

Pengakuan peran akuntansi dan akuntabilitas dalam pengaturan agama dapat beragam dan konseptualisasikan oleh ajaran atau keyakinan agama tertentu. Irvine berpendapat bahwa denominasi yang berbeda, maka organisasi akan memiliki pandangan yang berbeda, apakah akuntansi kompatibel dengan keyakinan agama mereka. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban penerima tanggung jawab untuk mengelola, melaporkan dan mengungkapkan semua kegiatan dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak yang berkontrak (contracting authority).

Akun yang berbeda memiliki prinsip tanggung jawab yang berbeda. Akuntabilitas dapat dilihat sebagai satu-satunya bagian terpenting dari informasi penting. Konsep akuntabilitas juga mengacu pada perlunya melacak apa yang telah atau belum dilakukan orang lain. Kredensial akses publik dibagi menjadi kredensial vertikal dan horizontal. Perjanjian vertikal adalah perjanjian dengan pemangku kepentingan yang lebih penting, sedangkan perjanjian horizontal adalah perjanjian dengan masyarakat umum atau organisasi lain tanpa hubungan atasan-bawahan yang mapan. Menurut Sharul, mekanisme akuntabilitas terdiri dari:

1. Penilaian dan evaluasi kinerja
2. Partisipasi
3. Perbaikan peraturan
4. Pemeriksaan sosial⁴

Bentuk Akuntabilitas Keuangan Masjid yaitu sebagai berikut:

a) Akuntabilitas Vertikal

Sebagai satu-satunya bentuk pekerjaan yang memenuhi syarat sebagai "ikhlas", "Akuntabilitas Vertikal" digunakan untuk melancarkan

⁴ Rini Rini, Pengeloaan keuangan Masjid Di Jabodetabek," *Akuntansi dan keuangan Islam*, 6 (2018): h. 114.

pemberontakan dan penodaan masjid sebagai bentuk amnesti selama skema tertentu untuk mentransfer dana ke observatorium yang lebih terkemuka.

Tanggung jawab pengelolaan dana masjid ini berhubungan langsung kepada Allah SWT. Dalam hal ini para pengelola dana masjid yang telah diterima dari para jama'ah atau masyarakat tidak hanya di pertanggung jawabkan kepada masyarakat saja tetapi tidak lupa kepada yang maha mengetahui segalanya dan maha melihat setiap hamba di muka bumi ini. Itu semua perlu di pertanggung jawabkan kepada yang Maha Kuasa yaitu Allah SWT.

Pengurus masjid dalam menerima dan menjalankan amanah itu harus mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi dalam memakmurkan dan menjaga masjid. Maksudnya para pengurus masjid harus berusaha untuk memfungsikan masjid sesuai dengan kebenarannya, tanpa ada kepentingan – kepentingan dari golongan yang tertentu. Dalam hal ini tidak memprioritaskan satu golongan saja karena meskipun masjid tempat bersama dalam beribadah tetapi dapat memungkinkan pengaruh politik dapat masuk untuk memberikan pengaruh yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, para pengurus masjid harus membatasi dalam masuknya pengaruh politik untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

b) Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas Horizontal merupakan tanggung jawab atas pengelolaan dana kepada publik secara luas. Artinya, Tanggung jawab pengelolaan dana masjid ini terhadap jama'ah atau masyarakat sekitar selaku pengelola yang mengatur pengelolaan keuangan masjid. Jadi untuk menghindari adanya fitnah dari parah masyarakat, para pengurus masjid harus mempertanggung jawabkan mengenai pengelolaan keuangan masjid dengan membuat laporan keuangan yang lebih akurat. Para Pengurus masjid dalam praktik menyampaikan laporan keuangannya itu disampaikan melalui fasilitas yang ada di masjid. Seperti di papan informasi yang dapat dilihat oleh semua jama'ah atau masyarakat. Jadi pengurus masjid dapat melihat perkembangan

keuangan masjid melalui bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang dilakukan oleh para pengurus.⁵

B. Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Menurut Effendi, prinsip-prinsip akuntabilitas yaitu sebagai berikut:

1. Agar hasil proyek lebih berhasil dibebankan, pimpinan proyek dan anggota organisasi harus berkomitmen untuk melaksanakannya.
2. Mengembangkan sistem yang dapat memverifikasi konsistensi penggunaan aturan penggunaan sumber daya berdasarkan aturan undang-undang yang aktif.
3. Harus dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang jelas, serta hasil dan manfaat yang sah.
4. Dapat mengungkapkan bagaimana tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai.
5. Memiliki nilai kejujuran, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan dan manajemen organisasi dalam bentuk pemuktahiran metode dan pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

C. Dimensi Akuntabilitas Publik

Menurut Ellwood dan Putra, ada empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sector public, yaitu :

- a) Akuntabilitas Hukum dan kejujuran (Accountability for Legality and Probity)

Akuntabilitas Probity mengacu pada pencegahan penyalahgunaan jabatan dengan menjaga nilai kejujuran yang mendorong pelaksanaan tujuan, sedangkan akuntabilitas hukum merupakan implementasi yang

⁵ Nurul Afifah and Fadli Faturrahman, Analisis Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi ISAK 35 Pada Yayasan An-Nahl Bintang', *JAJA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UTS Journal Of Accounting, Finance and Auditing*, 3.2 (2021), 24-34.

berkaitan dengan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut yang tertuang dalam penggunaan sumber pendanaan secara terbuka.

b) Akuntabilitas program (Program accounting)

Akuntabilitas adalah program yang mengacu pada mempertimbangkan apakah mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan hasil terbaik dengan biaya paling sedikit? Kesetiaan program juga berkaitan dengan bagaimana organisasi membuat program, yang berfokus pada rencana untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Sangat penting untuk mengungkapkan hasil proyek organisasi sehingga kami dapat menentukan berapa banyak orang yang disetujui untuk hasil proyek sebelum diimplementasikan.

c) Akuntabilitas Proses (Process Accountability)

Proses membangun kompatibilitas antara pelaksanaan proyek dan tenggat waktu awal, yang dikenal sebagai akuntabilitas, berfokus pada produk yang digunakan, serta kinerjanya dan tantangan apa pun yang mungkin mereka hadapi dalam mencapai tujuan dan tenggat waktu sebelumnya. Ini bukan hanya tentang apa yang sedang dilakukan, akuntabilitas organisasi meluas ke bagaimana organisasi bekerja setiap hari juga.

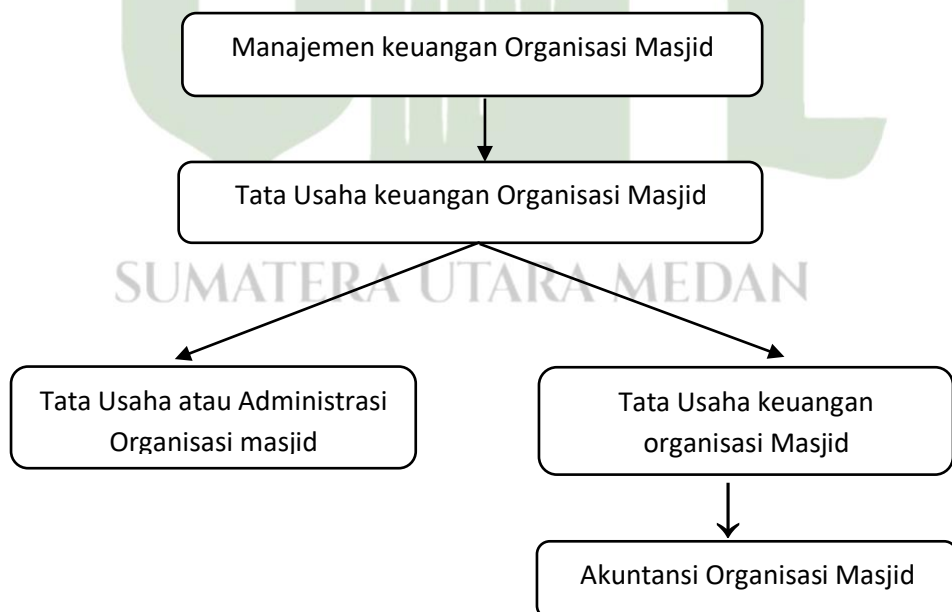
d) Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability)

Dalam konteks pertanggungjawaban pemerintah, baik di tingkat lokal maupun nasional, menitikberatkan pada tindakan pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Kebijakan atas dasar ini merupakan ketentuan yang harus digunakan sebagai alat, panduan, atau panduan untuk setiap tugas manajemen organisasi. Pertanggungjawaban tidak hanya berkaitan dengan laporan akun keuangan, tetapi juga pertanggungjawaban organisasi terhadap setiap dan semua proyek yang dilaksanakan sebagai

bagian dari perannya sebagai pemegang perwalian sehingga semua proyek dan pertanggungjawaban proyek dapat dilakukan per laporan, hadir, dilaporkan, dan diungkapkan.

D. Laporan keuangan Berbasis Akuntabilitas

Badu, Ronald S. dan Imran Rosman Hambali mengatakan, alat untuk menerapkan pengelolaan keuangan adalah administrasi. Administrasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu administrasi umum atau administrasi dan manajemen keuangan. Akuntansi adalah administrasi keuangan. Dengan demikian, akuntansi untuk organisasi keagamaan adalah manajemen keuangan organisasi keagamaan. Ini sesuai dengan Gambar 1.



Sumber: (Badu & Imran Rosman Hambali,2010)

Gambar 1. Metodologi Pengembangan Sistem Informasi akuntansi Koperasi dan UMKM

Akuntansi masjid menggunakan metode pencatatan berbasis kas, yang merupakan metode pencatatan di mana pendapatan dan biaya dicatat hanya ketika uang tunai diterima dan dibayar. Metode basis kas tidak dapat mengukur dengan benar tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program, atau aktivitas. Akuntansi secara akrual dinilai lebih baik daripada kas karena diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal.⁶

3. Pengelolaan Keuangan Masjid

Masjid adalah tempat sujud atau rumah Allah yang mulia, yang berisi orang-orang yang ingin tunduk dan bersujud kepada Allah SWT hanya untuk menyembah-Nya. Masjid sebagai rumah Allah merupakan bangunan suci yang menempati posisi yang sangat penting bagi umat Islam baik pada hakikatnya maupun dalam praktiknya. Ketika sampai pada keprihatinan masjid dalam cara hidup Islam, tentu saja Firman Tuhan terkait dengannya, yaitu:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى زَكَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُ يُعْمَلُ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Artinya: Hanya orang-orang yang mengganggu masjid-masjid Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah SWT dan melaksanakan shalat, yang membayar Zakat dan tidak takut (kepada siapapun) kecuali Allah SWT (Al-Taubah: 9, ayat 18)⁷

Maksud kandungan dari ayat tersebut merupakan memperoleh harta yang halal dengan mengamalkan dengan melakukan pembinaan dengan baik, mendirikan sholat didalamnya, serta melakukan amalan- amalan masjid yang

⁶ Dony Waluya Firdaus and Hery Dwi Yulianto. *Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Entitas Nirlaba Dalam Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akuntabilitas Masjid*. Riset Akuntansi dan Keuangan 6 (2018): 31.

⁷ Uthman El-Muhammady, ' Masjid Dalam Islam Sejarah, Peran Dan Kedudukan by Muhammad Uthman El- Muhammady (z-Lib,Org) (1)', 2020.

baik. Hal tersebut termasuk ke dalam salah satu pembinaan menjaga masjid dari pada apa-apa yang tidak menjadi tujuan bagi para pembinaannya.

Selain itu masjid disebut juga sebagai simbol ibadah karena jika dimaknai dalam suatu sistem akuntansi maka tidak lepas dari sistem pelaporan keuangan. Dalam sistem pengelolaan setiap masjid tentunya memiliki tata kelola yang berbeda - beda termasuk dalam pengelolaan keuangan masjid. Oleh karena itu, pihak pengurus masjid harus membuat laporan keuangan yang akurat dan relevan sebagai suatu pernyataan untuk memberikan informasi yang akurat kepada para pihak donator masjid. Sebagai bentuk penyajian laporan keuangan yang baik maka diperlukan sistem penerapan akuntansi. Dengan penerapan akuntansi ini tata kelola keuangan lebih menjadi akurat. Jadi, Pengelolaan laporan keuangan masjid ini sangat penting dilakukan untuk penyusunan atau penyajian pelaporan keuangan yang lebih baik.⁸

Menurut Halim, pengelolaan keuangan masjid umumnya membutuhkan perencanaan keuangan masjid yang sehat. Rencana ini mencakup secara rinci pengeluaran dan pendapatan dana sehingga persyaratan biaya operasional dan pemenuhannya dapat diperkirakan.

1. Mekanisme penyusunan anggaran

Mekanisme penganggaran meliputi:

- a. Setiap bidang pekerjaan menggambarkan program kerja yang dihasilkan dari memberi nasihat kepada pemerintah kota tentang kegiatan tahunan.
- b. Mengidentifikasi dan menjadwalkan kegiatan.
- c. Melakukan perhitungan biaya dan pembiayaan untuk setiap kegiatan.
- d. Penyajian anggaran yang disusun untuk masing-masing daerah pada rapat kerja pengurus.

⁸ Muhammad Ahyaruddin and other, 'akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Di Kota Pekanbaru', *Jurnal Pengelolaan UntukMu Negeri*, 1.1 (2017), 7-12 <https://doi.org/10.37859/jpumri.v1i1.27>.

e. Implementasi integrasi pendanaan dan pendapatan secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan skala prioritas.

2. Penganggaran (budgeting)

Melalui sesi kerja, manajemen membuat anggaran belanja dan pendapatan sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan. Upaya sedang dilakukan untuk menyiapkan anggaran bagi manajemen agar memiliki sumber pendanaan yang jelas sehingga tidak mengalami defisit. Antara lain, hal-hal berikut harus diperhatikan:

- a. Melakukan prioritas kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dana.
- b. Pos-pos pengeluaran dan pemasukan ditunjukkan secara jelas.
- c. Melakukan integrasi seluruh bidang dalam menyusun anggaran dengan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Pengelolaan (RKAP).

3. Pemasukan dan Pengeluaran

Semua pemasukan dan pengeluaran harus selalu dicatat dengan cermat dan teratur dalam buku box office dan kemudian dikumulasi setiap bulan. Uang tunai biasanya dicatat oleh seorang bendahara, yang ditunjuk untuk mempersiapkan administrasi masjid.

Menjadi salah satu aspek penting dalam berlangsungnya tata kelola keuangan masjid tentunya harus memiliki adanya dana. Sumber dana masjid asalnya dari perolehan pemberian donasi, kotak amal, infak, zakat dan shodaqoh dari para jamaah. Dengan adanya dana atau sumber pendapatan inilah masjid perlu melakukan pengelola keuangan. Untuk memiliki pengelolaan yang baik pihak pengurus masjid harus menyajikan laporan keuangannya dengan berbentuk sistematis atau sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Dalam sumber keuangan masjid berupa dari penerimaan-penerimaan sumbangan atau sedekah dari para jama'ah itu dipakai untuk mendanai keperluan masjid baik pengeluaran secara rutin maupun tidak rutin. Sebagai contohnya berupa mengeluarkan biaya fasilitas masjid dan keperluan yang dianggap penting oleh para pengurus masjid. Hal tersebut perlu dilakukan pencatatan secara akurat karena laporan keuangan yang di buat para pengurus masjid masih sederhana maka ditakutkan akan menimbulkan fitnah dari para masyarakat. Oleh sebab itu, tidak hanya pencatatan pengeluaran saja tetapi semua yang berkaitan dengan transaksi baik penerimaan, pengeluaran ataupun penggunaan kas, laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus masjid harus akurat.

Pengelolaan keuangan masjid tentu saja memerlukan akuntabilitas sebagai bentuk laporan entitas nonlaba. Karena masjid merupakan salah satu organisasi nonlaba keseluruhan data dan informasi yang disampaikan harus berdasarkan fakta dalam penyajian dalam pelaporan keuangan karena jika penyajiannya tidak baik maka akan berdampak buruk terhadap masyarakat. Begitu juga sebaliknya akan berdampak baik jika penyajiannya juga baik kepada para masyarakat sekitar. Dalam hal pengeluaran biaya masjid itu merupakan salah satu bentuk akuntabilitas terhadap jama'ah karena pengeluaran yang digunakan pihak pengurus masjid untuk semata-mata kepentingan bersama yaitu para jamaah. Oleh karena itu, masjid harus benar-benar mempertanggungjawabkan segala informasi mengenai laporan keuangannya sebab tidak hanya menyangkut kepada kepentingan publik saja tetapi juga pertanggungjawaban kepada yang Maha Kuasa yaitu Allah SWT.

4. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 (ISAK 35)

ISAK 35 merupakan pengganti PSAK 45, yang berkaitan dengan laporan keuangan tahunan organisasi nonlaba yang diratifikasi pada 11 April 2019 dan diratifikasi pada 1 Januari 2020 yang telah mulai berlaku. ISAK 35 merupakan interpretasi dari PSAK 1, yaitu representasi laporan keuangan, Paragraf 05, yang memberikan contoh bagaimana entitas nirlaba melakukan penyesuaian pada penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk item tertentu dalam laporan keuangan dan penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri.⁹ Dalam ISAK 35 terdapat beberapa hal yaitu:

1. Penyajian rekening tahunan organisasi nonlaba harus mempertimbangkan persyaratan penyajian rekening tahunan, struktur laporan keuangan tahunan dan persyaratan minimum untuk isi laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam PSAK 1.
2. Organisasi nonlaba dapat melakukan penyesuaian pada deskripsi yang digunakan untuk beberapa item yang disertakan dalam laporan keuangan. Misalnya, jika sumber daya yang diterima dari organisasi nonlaba mengharuskan organisasi untuk memenuhi kondisi yang terkait dengan sumber daya, organisasi dapat mewakili jumlah sumber daya berdasarkan sifatnya, yaitu ada atau tidak adanya batasan oleh penyedia sumber daya.
3. Perusahaan nirlaba juga dapat menyesuaikan deskripsi laporan keuangan tahunan itu sendiri. Misalnya, penyesuaian pada judul laporan keuangan tahunan tidak dibatasi selama judul pengembangan aset bersih digunakan sebagai pengganti perubahan ekuitas. Penyesuaian judul laporan keuangan tidak dibatasi selama judul digunakan yang mencerminkan fungsi yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangan.
4. Entitas nirlaba tetap harus mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan saat mengirimkan akun tahunan mereka, termasuk catatan, agar tidak membahayakan kualitas informasi yang terkandung dalam akun tahunan.

⁹ Yola Oktavia, Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan ISAK 35 Pada kelompok Tani Mekar sari. *Jurnal Akuntansi Syariah*, (2021), h. 160.

Dalam PSAK 45, laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan kegiatan, laporan arus kas, laporan perubahan aktiva bersih dan catatan penjelasan atas laporan keuangan tahunan. Dalam klasifikasi aktiva bersih, PSAK 45 membaginya menjadi kekayaan bersih terbatas, di mana terdapat batasan pembatasan permanen dan sementara dan kekayaan bersih tidak terbatas. Meskipun terdapat laporan laba komprehensif dalam ISAK 35, klasifikasi kekayaan bersih dalam ISAK 35 dibagi menjadi aktiva bersih dengan batasan dan aktiva bersih tanpa batasan.

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi, yang terdiri dari pengumpulan, klasifikasi, ringkasan, pelaporan dan analisis data. Pencatatan dan pengklasifikasian kegiatan adalah proses yang secara rutin dan berulang kali dilakukan dalam setiap transaksi keuangan.¹⁰

Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi organisasi nonlaba berdasarkan ISAK 35 meliputi:

1. Laporan Posisi Keuangan

Adalah laporan keuangan yang berisi informasi tentang aset, kewajiban, dan aset bersih perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Laporan ini dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai nilai aset dan kewajiban organisasi nonlaba.

Dalam neraca organisasi nirlaba ada:

a. Aset

Merupakan sumber daya yang memiliki nilai ekonomis dan mampu mendukung kegiatan entitas, dapat dihitung pada nilai nominal ketika diterima dan dihitung pada nilai nosional ketika diterima, dan dihitung pada nilai wajar sesuai dengan kondisi objektif.

Secara umum, aset itu sendiri terdiri dari:

1. Kas dan setara kas
2. Klaim
3. Persediaan

¹⁰ Sahman Sitompul, Nurlaila Harahap, and Hendra Harmain, Akuntansi Masjid (Medan: FEBI UINSU, 2015), p.63.

4. Sewa
5. Instrumen keuangan dan investasi jangka panjang
6. Dan aset lainnya berupa tanah, bangunan, peralatan yang mendukung kegiatan perusahaan.

b. Liabilitas

Kewajiban adalah kewajiban Perseroan kepada pihak lain yang belum diselesaikan atau dibayar dalam jangka waktu tertentu. Utang merupakan sumber pendanaan yang digunakan untuk mendukung kegiatan perusahaan dan diterima oleh kreditur yang bersangkutan untuk pelunasan. Kewajiban yang diungkapkan terdiri dari:

1. Hutang
2. Pendapatan diterima dimuka
3. Hutang lainnya
4. Dan hutang jangka panjang.

c. Aset Neto

Aktiva bersih umumnya merupakan modal yang dihasilkan dari aset yang kurang liabilitas. Namun, pada neraca organisasi nonlaba, kekayaan bersih dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) Aset Neto Tanpa Pembatasan

Adalah aset yang tidak memiliki batasan pada penggunaan aset. Dana ini, yang diterima, misalnya, dari donor tanpa memberikan informasi, dapat digunakan oleh korporasi untuk memenuhi semua kebutuhan mereka.

2) Aset Neto Dengan pembatasan

Ini adalah aset yang penggunaannya dibatasi oleh penyedia sumber daya. Misalnya, memberikan tanah/bangunan dengan tujuan tertentu, seperti uang tunai untuk anak yatim dan uang tunai untuk orang

miskin. Sederhananya, donor menyediakan sumber daya dalam kondisi tertentu.

2. Laporan Penghasilan Komprehensif

Laporan ini digunakan untuk menyajikan surplus (defisit) dan aspek luas lainnya dari suatu perusahaan. Dan merupakan laporan yang menunjukkan laba atau rugi perusahaan selama periode tertentu, di mana ada juga pendapatan dan pengeluaran perusahaan dalam suatu periode. Laporan akun laba rugi atau laba rugi yang komprehensif memberikan informasi tentang:

- 1) Pendapatan
- 2) Beban
- 3) Laba/rugi neto

3. Laporan Perubahan Aset neto

Adalah laporan yang berisi informasi tentang kekayaan bersih tanpa batasan donor dan kekayaan bersih dengan batasan dari penyedia sumber daya. Ini juga berisi informasi tentang melepaskan aset dari penyedia sumber daya dengan batasan apa pun.

4. Laporan arus kas

Ini memberikan informasi tentang pendapatan dan pengeluaran perusahaan dalam periode waktu tertentu.

5. Catatan atas laporan keuangan tahunan

Merupakan bagian dari laporan keuangan yang memberikan informasi tambahan, mendukung dan mendukung atas laporan keuangan utama yang memudahkan pengguna laporan keuangan untuk membacanya.

5. Organisasi Nonlaba

Pada dasarnya, praktek akuntansi organisasi nonlaba tidak jauh berbeda dengan organisasi Nirlaba. Dimana sangat terlihat jelas ada aturan akuntansi organisasi nonlaba ini yang diatur sebagai bagian dari Standar Akuntansi

Kuangan (SAK) yaitu dari pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ISAK 35 tentang laporan keuangan organisasi nirlaba. Dalam perkembangannya Manajemen keuangan entitas nirlaba diperlukan untuk fondasi yang jelas.

Sejak diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi PSAK No. 45 untuk Lembaga Pelaporan Keuangan Nirlaba pada tanggal 20 Desember 1997, dan oleh Dewan Pusat Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 23 Desember 1997, Standar Organisasi Pelaporan Keuangan Nirlaba terus mengalami revisi. Kemudian, pada tanggal 8 April 2011, Badan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menerbitkan revisi PSAK No. 45. Pada tanggal 26 September 2018, Dewan Standar Akuntansi Keuangan menyetujui Standar Interpretasi untuk Pengakuan Pengetahuan (ISAK) No. 35, yang telah berlaku sejak saat itu dan akan terus berlaku sampai dengan awal atau setelah tahun kalender 2020.¹¹

Terdapat prinsip bentuk laporan yang telah di atur dalam PSAK 45 yaitu pencatatan transaksi organisasi nirlaba dari penerimaan kas, pengeluaran, pembelian, penjualan produk ataupun jasa, penyusutan, dan transaksi regular. Dengan demikian yang membuat perbedaan dari kedua organisasi ini yaitu organisasi nirlaba ini tidak ada pihak yang akan menjadi pemiliknya. Ada terdapat perbedaan dari kedua organisasi nirlaba PSAK No. 45 dan ISAK No. 35 yaitu sebagai berikut:

1. Dalam ISAK No. 35 klasifikasi aset neto hanya membagi 2 klasifikasi yaitu dengan perbatasan dan tanpa perbatasan. Sedangkan PSAK No.45 sumber daya diklasifikasikan ke dalam 3 pos yaitu aset neto tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen.
2. Dalam judul laporan keuangan ISAK No.35 disebut laporan penghasilan Komprehensif yang hanya memuat informasi sampai surplus atau deficit tahun berjalan.

¹¹ Iqbal Subhan and Mujibur Rahmat, "Penerapan ISAK No.35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Beorientasi Entitas Nonlaba Pada Masjid Besar Al-atqiyah Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa," *Journal Of Accounting Finance and Auditing* 3, no.2 (2021): 64.

3. Pada ISAK No. 35 laporan aset perubahan aset neto merupakan bagian dari jenis laporan keuangan entitas nonlaba. Sedangkan pada PSAK No.45 hanya sebagai alternative.

Organisasi nonlaba adalah organisasi atau lembaga dari beberapa orang yang memprioritaskan kegiatan sosial dan memiliki tujuan utama untuk mencapai tujuan-tujuan ini, dan berorientasi pada pendapatan laba atau laba.

Laporan keuangan organisasi nonlaba disiapkan untuk memberikan informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan transaksi perusahaan selama periode pelaporan tertentu. Sesuai dengan apa yang dikatakan Kamsir, laporan keuangan tersebut merupakan deskripsi atau posisi keuangan perusahaan pada saat itu atau dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari laporan keuangan tahunan, yang menunjukkan situasi perusahaan saat ini, adalah situasi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk akun laba rugi).

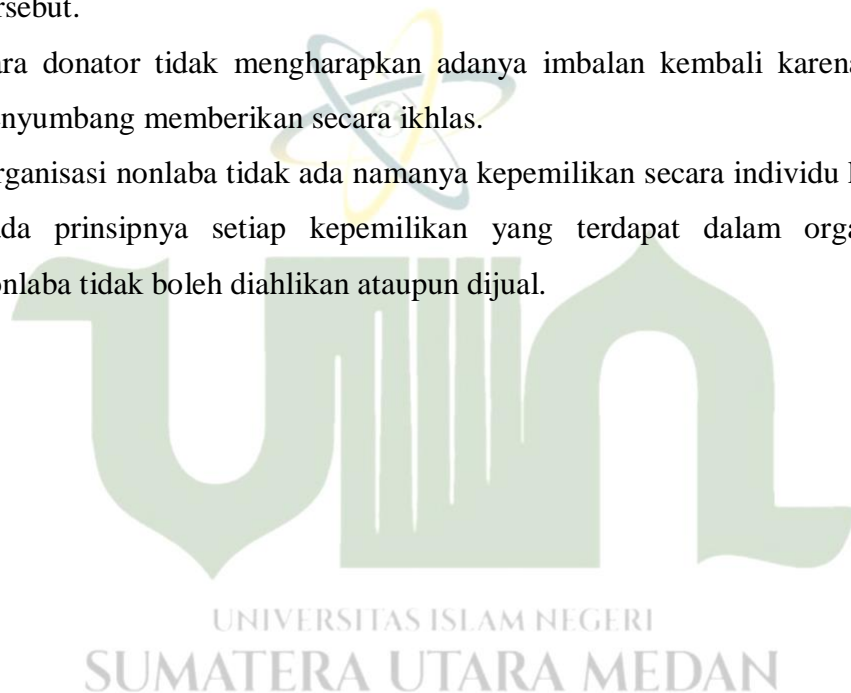
Laporan keuangan tidak hanya harus disusun dalam jangka waktu akuntansi, tetapi juga harus disusun secara konsisten. Menurut Mardiasmo, dalam penelitiannya, Mardiasmo menjelaskan tujuan konsistensi ketika sebuah perusahaan menggunakan metode akuntansi yang sama untuk menyusun laporan keuangan selama beberapa periode berturut-turut.

Sering ditemui banyaknya kasus bahwa pengelola masjid tidak amanah dalam pengelolaan keuangan, banyak terdapat kesenjangan yang dilakukan oleh pihak pengurus masjid. Oleh karena itu, organisasi nonlaba perlu menyusun laporan keuangannya. Hal ini bagi sebagian organisasi nonlaba yang lingkupnya masih kecil serta sumber dayanya masih belum memadai, mungkin akan menjadi hal yang menentang untuk dilakukan. Terlebih karena organisasi nonlaba jenis ini umumnya lebih fokus pada pelaksanaan program ketimbang mengurus administrasi. Namun, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan karena organisasi nonlaba tidak boleh hanya mengandalkan pada menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan pemberi sumber daya yang

tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nonlaba.

Ada beberapa ciri-ciri organisasi nonlaba yaitu sebagai berikut:

1. Dalam memperoleh barang/jasa tidak hanya semata-mata untuk menghasilkan keuntungan atau pencarian laba. Selain itu setiap hasil entitas nirlabanya tidak pernah dibagikan kepada para pemilik entitas tersebut.
2. Para donator tidak mengharapkan adanya imbalan kembali karena para penyumbang memberikan secara ikhlas.
3. Organisasi nonlaba tidak ada namanya kepemilikan secara individu karena pada prinsipnya setiap kepemilikan yang terdapat dalam organisasi nonlaba tidak boleh diahlikan ataupun dijual.



B. Kajian Terdahulu

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang disajikan dalam table 1.

Tabel 1.

Kajian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Nurul Fitri Rizqia (2021)	Implementasi Akuntabilitas pengelolaan keuangan berdasarkan ISAK No. 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Nonlaba	Deskriptif Kualitatif	Hasil suatu Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan yang ada di Masjid Jami' Mekar Indah dalam hal mengelola keuangannya dengan sangat hati-hati dan dalam penyajian laporan keuangannya masih sederhana, yakni pencatatan pemasukan dan pengeluaran kas yang disampaikan pengurus kepada para jama'ah atau masyarakat sekitar. Dalam hal ini Masjid Jami' mekar Indah belum menerapkan ISAK No. 35 sebagai pedoman penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba. Hal ini dikarenakan para pengurus belum pernah mendengar dan mengetahui standar pencatatan tersebut serta membutuhkan staff ahli dalam bidangnya. Jadi, transaksi tersebut dijadikan satu tanpa

				adanya pembeda yang cukup jelas karena SDM yang kurang memahami dalam pengelompokkan jenis transaksi tersebut.
2.	Iqbal Subhan Maulana dan Mujibur Rahmat (2021)	Penerapan ISAK No. 35 Tentang Penyajian laporan Entitas Berorientasi Nonlaba pada Masjid Besar Al-Atqiyah Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan keuangan masjid besar Al-Atqiyah yang menggunakan metode yang sederhana. Pencatatan keuangan hanya diragukan jika terjadi kas masuk dan keluar (basis kas). Kemudian jumlah kas masuk, kas keluar, dan total kas dilaporkan setiap hari jum'at dengan cara disampaikan menggunakan microphone masjid. Penyusunan Laporan keuangan Masjid Besar Al-Atqiyah yang disusun berdasarkan ISAK No.35 menghasilkan laporan keuangan yang lebih terstruktur dan lebih terperinci bukan hanya terkait kas masuk dan kas keluar semata.
3.	Ayu Rahmawati (2021)	Akuntabilitas pada pengelolaan keuangan Masjid Nurul Islam menurut ISAK No. 35 Tentang	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan Bahwa Masjid Nurul Islam belum menerapkan ISAK No. 35 karena format penyusunan laporan keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran kas yang

		Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non Laba.		disusun dalam bentuk laporan rencana pendapatan dan belanja masjid dan siplesi realisasi arus kas masjid selama satu tahun. Selain itu, pengelolaan keuangan Masjid Nurul islam menyajikan laporan keuangannya dengan bantuan computer dalam bentuk Microsoft Excel sehingga laporan keuangan yang dihasilkan sudah terinci.
4.	Sully Kemala Octisari,dll. (2021)	Akuntabilitas Masjid Berdasarkan ISAK 35 di Wilayah Kecamatan kedung Banteng, Kabupaten Banyumas.	Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Masjid di wilayah Kecamatan Kedung Banteng dalam pengelolaan keuangannya sudah termasuk akuntabel. Tetapi Masjid ini belum menerapkan ISAK 35 mengenai penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. Sebab para pengurus masjid belum mengenal istilah tersebut dan juga masyarakat saling percaya kepada pengelola keuangan selaku pengurus masjid yang bertugas dalam hal tersebut.
5.	Nurul Afifah &Fadli Faturrahman	Analisis Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Deskriptif Kualitaif	Hasil Penelitian ini ini menunjukkan bahwa Yayasan ini belum menerapkan indikator akuntabilitas

	(2021)	Sesuai Standar Akuntansi ISAK 35 Pada Yayasan An-Nahl Bintan	se penuhnya dalam penyajian laporan keuangannya dan juga belum menerapkan standar akuntansi ISAK 35 karena laporan keuangan yayasan ini masih belum sempurna akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan yayasan.
--	--------	--	---

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran pada penelitian ini memberikan gambaran penerapan Standar Akuntansi berdasarkan ISAK 35. Praktik akuntansi sebagai instrument akuntabilitas khususnya islam melalui masjid masih jarang menjadi perhatian, padahal dalam rangka penerapan akuntansi pada masyarakat dalam pengelolaan keuangan masjid sangatlah penting. Masjid Raya Al-Huda merupakan salah satu masjid terbesar yang ada di Mandailing Natal khususnya daerah Desa Natal. Masjid ini dijadikan sebagai pusat peribadatan masyarakat setempat. Maka tidak lepas dari dana yang masuk ke masjid tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan masjid perlu diperhatikan secara serius.

Dengan adanya penerapan akuntansi diharapkan pengurus masjid mampu menghasilkan tata kelola keuangan masjid dengan baik dengan membuat laporan keuangan dan mengumumkannya di hadapan jamaah secara transparan. Sehingga implikasi dengan dilakukannya penelitian ini untuk Masjid Raya Al-Huda sendiri yaitu masyarakat dan pembaca akan tahu bahwa seperti inilah pengelolaan keuangan pada Masjid Raya Al-Huda.

Gambar 2.**Kerangka Pikir**